Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan
Volume 5, Nomor 3, September 2026
e-ISSN: 2963-542X; p-ISSN: 2963-4997, Hal. 52-73
DOI: https://doi.org/10.58192/sidu.v5i3.5413
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sidu

Resistensi Masyarakat terhadap Penyitaan Minuman Tradisional Moke di Kabupaten Sikka

Paulinus Pangkarius[1*], Frans W. Muskanan[2], Ambrosius Dedi A. Sinu[3], Ananias R.P. Jacob[4]
[1-4]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
**Penulis Korespondensi: paulinuspangkarius@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze forms of community resistance to the confiscation of the traditional alcoholic beverage moke in Sikka Regency, the factors underlying such resistance, and community efforts to preserve moke as a cultural identity and source of livelihood. This study employs James C. Scott's theory of resistance, which distinguishes resistance into open resistance (public transcript) and hidden resistance (hidden transcript). Moke holds significant cultural, social, and economic value for the people of Sikka. The confiscation of moke by police officers in 2025 generated community opposition because it was perceived as threatening local culture and livelihoods. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving traditional leaders, moke producers, members of the Sikka Regency Regional House of Representatives, local government officials, and PMKRI Maumere student organization members. Data analysis involved data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate two forms of resistance. Open resistance included demonstrations, advocacy, public demands, and efforts to establish regulations protecting moke as cultural heritage. Hidden resistance involved silent non-compliance, informal criticism, and continued production and distribution. Resistance was driven by cultural, economic, social, policy, and law enforcement factors.*

Keywords: *Community Resistance; James C. Scott; Local Culture; Moke; Sikka Regency.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka, faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya resistensi, serta upaya masyarakat dalam mempertahankan moke sebagai identitas budaya dan sumber penghidupan. Penelitian ini menggunakan teori resistensi James C. Scott yang membedakan resistensi ke dalam bentuk terbuka (public transcript) dan resistensi tertutup (hidden transcript). Moke merupakan minuman tradisional yang memiliki nilai budaya, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Sikka. Tindakan penyitaan moke oleh aparat kepolisian pada tahun 2025 menimbulkan berbagai respons penolakan karena dipandang mengancam keberlangsungan budaya lokal dan mata pencaharian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, produsen moke, anggota DPRD Kabupaten Sikka, pemerintah daerah, serta organisasi mahasiswa PMKRI Maumere. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat diwujudkan melalui resistensi terbuka berupa demonstrasi, advokasi, penyampaian tuntutan publik, dan dorongan pembentukan regulasi yang melindungi moke sebagai budaya lokal. Resistensi tertutup ditunjukkan melalui ketidakpatuhan secara diam-diam, kritik informal, serta keberlanjutan produksi dan penjualan moke. Resistensi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, sosial, kebijakan, dan penegakan hukum. Masyarakat juga mempertahankan moke melalui praktik adat, solidaritas sosial, keberlanjutan produksi, serta upaya mendorong legalitas dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Budaya Lokal; James C. Scott; Kabupaten Sikka; Moke; Resistensi Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini membahas resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka. Penelitian berangkat dari adanya ketegangan antara kebijakan negara dalam melakukan penertiban minuman beralkohol dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang telah lama menjadikan moke sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi aparat kepolisian, moke dipandang sebagai minuman beralkohol yang perlu diawasi

Naskah Masuk: 09 Juni 2026; Revisi: 22 Juli 2026; Diterima: 24 Agustus 2026; Terbit: 01 September 2026

dan ditertibkan sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, bagi masyarakat Sikka, moke tidak hanya dipahami sebagai minuman beralkohol, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya, praktik adat, hubungan sosial, dan sumber penghidupan. Perbedaan pemaknaan tersebut kemudian memunculkan resistensi masyarakat terhadap tindakan penyitaan moke. Moke telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sikka secara turun-temurun. Dalam kehidupan adat, moke digunakan dalam berbagai kegiatan seperti upacara kematian, lamaran, pernikahan, serta ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Moke juga memiliki makna spiritual dan simbolik dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, produksi dan penjualan moke menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Dengan demikian, keberadaan moke memiliki fungsi yang tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Persoalan penyitaan moke semakin terlihat pada awal November 2025 ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Sikka melakukan operasi penertiban di beberapa wilayah Kabupaten Sikka dan menyita kurang lebih 315 liter moke dari sejumlah tempat produksi atau *kuwu* di Kecamatan Alok.

Dari perspektif aparat, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dianggap berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. Namun, tindakan tersebut mendapat respons dari masyarakat karena dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan nilai budaya dan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada produksi moke. Penelitian ini menggunakan teori resistensi James C. Scott untuk memahami respons masyarakat terhadap tindakan penyitaan tersebut. Scott membedakan resistensi menjadi resistensi terbuka (*public transcript*) dan resistensi tertutup (*hidden transcript*). Resistensi terbuka dilakukan secara langsung di ruang publik, sedangkan resistensi tertutup berlangsung secara tidak langsung dan tidak selalu terlihat oleh pihak yang berkuasa. Dalam penelitian ini, resistensi terbuka terlihat melalui demonstrasi, protes, penyampaian tuntutan, advokasi, dan keterlibatan PMKRI Maumere dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Sementara itu, resistensi tertutup terlihat melalui kritik terhadap kebijakan, ketidakpatuhan, serta tetap berlangsungnya produksi dan penjualan moke oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi resistensi masyarakat terhadap penyitaan moke, yaitu faktor budaya, ekonomi, sosial, serta kebijakan dan penegakan hukum. Faktor budaya muncul karena moke dipandang sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Sikka. Penggunaan moke dalam berbagai kegiatan adat menyebabkan penyitaan dipersepsikan tidak hanya sebagai tindakan terhadap suatu barang, tetapi juga sebagai tindakan yang menyentuh praktik budaya masyarakat. Masyarakat berupaya mempertahankan penggunaan moke dalam kegiatan adat

sebagai bentuk menjaga identitas dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Faktor kedua adalah ekonomi**.** Produksi dan penjualan moke menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Penyitaan hasil produksi dapat mengganggu pendapatan dan pemenuhan kebutuhan keluarga produsen moke. Karena itu, masyarakat memandang tindakan penyitaan sebagai ancaman terhadap sumber mata pencaharian mereka. Resistensi ekonomi terlihat dari keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankan aktivitas produksi dan distribusi moke serta tuntutan agar pemerintah memberikan solusi berupa legalitas usaha, pendampingan, dan pengelolaan yang lebih teratur. Faktor ketiga adalah sosial**.** Moke memiliki keterkaitan dengan hubungan sosial masyarakat karena digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan kehidupan bersama. Ketika terjadi penyitaan, respons tidak hanya datang dari produsen atau penjual moke, tetapi juga dari tokoh adat, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menunjukkan adanya solidaritas sosial dalam mempertahankan keberadaan moke.

Demonstrasi dan advokasi yang dilakukan secara bersama-sama memperlihatkan bahwa persoalan penyitaan moke telah berkembang dari persoalan individu menjadi persoalan kolektif masyarakat. Faktor keempat adalah kebijakan dan penegakan hukum. Resistensi muncul karena adanya perbedaan antara pendekatan hukum formal negara dengan pemaknaan masyarakat terhadap moke. Negara melihat moke dalam kerangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sedangkan masyarakat melihatnya dalam konteks budaya, adat, sosial, dan ekonomi. Masyarakat tidak sepenuhnya menolak adanya pengaturan terhadap moke, tetapi menginginkan adanya kebijakan yang lebih memperhatikan kondisi lokal. Hal tersebut terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap pembentukan regulasi, legalisasi produksi dan distribusi, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada moke. Dalam mempertahankan keberadaan moke, masyarakat melakukan berbagai bentuk tindakan, baik melalui pelestarian praktik adat, keberlanjutan produksi, penguatan solidaritas sosial, maupun penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Masyarakat dan PMKRI juga mendorong adanya mekanisme legalitas yang lebih jelas dan terjangkau, pendampingan terhadap produsen, serta pengembangan sistem pengelolaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi maarakat tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan terhadap kepentingan budaya serta ekonomi masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya negosiasi antara masyarakat dan negara setelah munculnya resistensi terhadap penyitaan. Masyarakat melalui organisasi mahasiswa, tokoh adat, dan kelompok masyarakat melakukan dialog dengan pemerintah daerah, DPRD, serta aparat kepolisian. Negosiasi tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat tidak bertujuan menolak seluruh bentuk pengaturan, melainkan menginginkan adanya jalan tengah antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban dengan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan budaya dan sumber penghidupan. Dengan demikian, resistensi berkembang menjadi upaya untuk memengaruhi kebijakan dan membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian empirik merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relefan dan terkait dengan penelitian yang digunakan. Berkaitan dengan rencana penelitian ini terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik lokal dalam kebijakan pelarangan minuman tradisional moke. Lobo (2020): "Regulasi Minuman Tradisional dan Ketegangan Sosial di Nusa Tenggara Timur" Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi minuman tradisional di NTT sering menimbulkan resistensi karena dianggap mengabaikan nilai budaya dan kepentingan ekonomi lokal. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji resistensi masyarakat terhadap regulasi pemerintah. Perbedaannya, penelitian Lobo tidak fokus pada dinamika politik lokal atau aktor politik, sementara penelitian ini menitikberatkan pada hubungan kekuasaan dan proses politik dalam kebijakan pelarangan *moke*. Riberu (2021): "Kebijakan Publik dan Budaya Lokal: Studi Kasus Tradisi Minuman Fermentasi di Flores" Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik Dye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek budaya cenderung gagal diimplementasikan secara efektif. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan dan budaya lokal. Perbedaannya, penelitian ini fokus pada efektivitas kebijakan, sedangkan penelitian dalam penelitian ini menekankan dinamika politik lokal dalam proses kebijakan. Tukan (2023): "Politik Lokal dan Pengelolaan Tradisi di Kabupaten Sikka" Metode yang digunakan adalah etnografi politik dengan observasi partisipatif dan wawancara elite. Teori yang digunakan adalah teori politik lokal dari Smith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite lokal memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan budaya. Persamaannya, keduanya meneliti politik lokal di Sikka. Perbedaannya, penelitian Tukan lebih umum membahas hubungan elite dan budaya, sedangkan penelitian dalam penelitian ini mengkhususkan pada kebijakan pelarangan *moke*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik, khususnya mengenai resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, persepsi, serta respons masyarakat terhadap tindakan aparat negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bentuk resistensi masyarakat, faktor yang melatarbelakanginya, serta relasi antara masyarakat dan aparat negara dalam peristiwa penyitaan moke berdasarkan teori resistensi James C. Scott.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada wilayah yang berkaitan dengan produksi, penjualan, dan tindakan penyitaan moke. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa moke memiliki keterikatan dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Sikka. Selain itu, Kabupaten Sikka merupakan lokasi terjadinya tindakan penyitaan moke oleh aparat kepolisian yang kemudian menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

Informan Penelitian Dan Informen Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang berkaitan dengan persoalan penyitaan moke dan resistensi masyarakat. Informan penelitian meliputi: Masyarakat pembuat moke, Tokoh adat dan tokoh masyarakat, Kapolres Sikka, Bupati Sikka, Perwakilan organisasi masyarakat atau mahasiswa yang terlibat, dan DPRD Kabupaten Sikka.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi objek penelitian agar pengumpulan dan pembahasan data tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka. Adapun subfokus penelitian meliputi: pertama, resistensi terbuka, yaitu perlawanan yang dilakukan masyarakat secara langsung di ruang publik, seperti protes, kritik terbuka, pernyataan sikap, demonstrasi, dan aksi kolektif. Kedua, resistensi tertutup, yaitu bentuk perlawanan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti ketidakpatuhan, kritik informal, penolakan simbolik, serta sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan

penyitaan. Ketiga, faktor yang mendorong resistensi, meliputi faktor budaya, sosial, ekonomi, serta kebijakan dan penegakan hukum. Keempat, relasi kekuasaan, yaitu hubungan antara aparat negara dan masyarakat lokal dalam proses penyitaan moke serta respons masyarakat terhadap tindakan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi dan situasi sosial masyarakat yang berkaitan dengan persoalan moke. Observasi diarahkan pada aktivitas masyarakat, kondisi produksi dan penjualan moke, serta bentuk interaksi dan respons masyarakat setelah terjadinya tindakan penyitaan. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara

Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan. Wawancara bertujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, makna, serta respons informan terhadap penyitaan moke. Wawancara dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga peneliti dapat menggali informasi yang belum diperoleh melalui observasi.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti arsip, laporan, pemberitaan, foto, gambar, dan dokumen lainnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau narasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Proses analisis data mengacu pada tahapan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulanReduksi Data. Reduksi data merupakan proses memilih, merangkum, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan penelitian disisihkan, sedangkan data yang berkaitan dengan bentuk resistensi, faktor

pendorong resistensi, serta relasi masyarakat dan aparat negara dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Penyajian Data dan Triangulasi

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau narasi sehingga informasi dapat dipahami secara sistematis. Dalam proses ini dilakukan triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi digunakan untuk memperkuat keabsahan data dan memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

PenarikanKesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan disusun dengan mengacu pada fokus, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk resistensi masyarakat terhadap penyitaan moke, faktor yang melatarbelakanginya, serta relasi kekuasaan antara masyarakat dan aparat negara dalam persoalan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moke merupakan minuman tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Sikka dan dipandang sebagai warisan serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, PMKRI, DPRD, pemerintah daerah, dan produsen moke, seluruh informan memandang bahwa moke memiliki keterikatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan adat, hubungan sosial, hingga kehidupan ekonomi. Moke hadir dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat, seperti kelahiran, penyelesaian konflik, kegiatan adat, hingga kematian. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa moke masih digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan sosial, serta masih diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat sederhana yang diwariskan dalam keluarga. Studi dokumentasi turut memperlihatkan adanya pandangan dari masyarakat, organisasi mahasiswa, dan pemerintah daerah bahwa moke merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan, termasuk melalui upaya mendorong adanya regulasi yang memberikan perlindungan terhadap produksi dan distribusi moke. Dalam perspektif teori resistensi James C. Scott, keberadaan moke sebagai identitas budaya menjadi salah satu dasar munculnya resistensi masyarakat terhadap tindakan penyitaan oleh negara. Penyitaan tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga dianggap menyentuh identitas, nilai budaya, dan ruang sosial masyarakat Sikka. Oleh karena itu, upaya mempertahankan keberadaan moke dapat dipahami sebagai bentuk masyarakat dalam menjaga identitas kolektif

dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini sejalan dengan Nugroho & Prasetyo (2022) yang menjelaskan bahwa warisan budaya berperan dalam membentuk identitas kolektif masyarakat, serta Putri dan Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa masyarakat adat cenderung mempertahankan unsur budaya yang dianggap mewakili sejarah dan identitas komunitas. Dengan demikian, moke tidak hanya merupakan minuman tradisional, tetapi juga simbol identitas kolektif masyarakat Sikka yang terus dipertahankan keberadaannya.

***Public Transcript* (Perlawanan Terbuka) Masyarakat Terhadap Penyitaan Moke**

Bentuk resistensi terbuka (*public transcript*) masyarakat terhadap penyitaan moke di Kabupaten Sikka terlihat melalui aksi demonstrasi, penyampaian protes secara terbuka, advokasi organisasi mahasiswa, serta dialog dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Resistensi tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa tindakan penyitaan moke tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan mata pencaharian masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat memilih menyampaikan ketidaksetujuan secara langsung melalui ruang publik sebagai bentuk respons terhadap tindakan aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Debrito selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Maumere, PMKRI melakukan advokasi dan aksi demonstrasi sebagai bentuk respons terhadap penyitaan moke oleh Polres Sikka. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan keresahan masyarakat, khususnya petani moke lokal yang terdampak oleh tindakan penyitaan. PMKRI Maumere juga melakukan aksi pada 6 November 2025 dengan membawa tuntutan penolakan terhadap penyitaan moke. Dalam aksi tersebut, PMKRI tidak bergerak sendiri, tetapi berkonsolidasi dengan petani moke, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi terbuka tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi berkembang menjadi tindakan kolektif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Marianus selaku anggota DPRD Kabupaten Sikka yang menyatakan bahwa masyarakat melakukan demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap penyitaan moke. Dari sisi kepolisian, tindakan penyitaan dijelaskan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dalam pengamanan minuman beralkohol dan upaya menjaga ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa pelaksanaan tindakan tersebut didasarkan pada tugas pokok, fungsi, serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Namun, pihak kepolisian juga mengakui bahwa belum terdapat aturan daerah yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai moke. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kemudian mendorong masyarakat untuk meminta adanya aturan yang lebih jelas. Tokoh adat juga menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap regulasi daerah yang dapat memberikan perlindungan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi moke. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tuntutan masyarakat tidak semata-mata berupa penolakan terhadap aparat atau kebijakan penertiban. Masyarakat juga berusaha mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan moke. Dengan demikian, resistensi terbuka dalam penelitian ini memiliki dua sisi, yaitu penolakan terhadap tindakan penyitaan dan tuntutan agar pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa aksi demonstrasi dilakukan di beberapa lokasi, seperti Polres Sikka, Kantor DPRD Kabupaten Sikka, dan Kantor Bupati Sikka. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan berkaitan dengan penghentian penyitaan moke dan perlindungan terhadap petani moke lokal.

Aksi tersebut melibatkan organisasi mahasiswa, petani moke, tokoh adat, dan masyarakat umum. Keterlibatan berbagai kelompok tersebut memperlihatkan adanya solidaritas kolektif dalam mempertahankan moke sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sikka. Hasil studi dokumentasi juga menunjukkan bahwa penyitaan moke berkaitan dengan kebijakan pengawasan minuman beralkohol. Regulasi mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat Kabupaten Sikka menilai bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks budaya lokal. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap budaya lokal masyarakat. Berdasarkan teori resistensi James C. Scott, bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai *public transcript*, yaitu bentuk resistensi yang dilakukan secara terbuka di hadapan pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kasus penyitaan moke, negara melalui aparat kepolisian memiliki kewenangan hukum dan kekuasaan formal untuk melakukan penertiban. Sementara itu, masyarakat memiliki kekuatan sosial dan budaya yang digunakan untuk menyampaikan penolakan terhadap tindakan tersebut. Perbedaan posisi tersebut menciptakan relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal. Masyarakat Kabupaten Sikka memandang moke sebagai bagian dari identitas budaya, praktik ritual adat, dan sumber penghidupan ekonomi. Sementara itu, negara cenderung memandang moke dalam kerangka legal-formal sebagai minuman beralkohol yang harus diawasi dan ditertibkan. Perbedaan pemaknaan inilah yang kemudian memunculkan ketegangan. Masyarakat menunjukkan resistensi terbuka melalui demonstrasi, advokasi PMKRI, penyampaian tuntutan kepada DPRD dan pemerintah daerah, serta protes terhadap tindakan aparat kepolisian. Bentuk perlawanan tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat tidak menerima sepenuhnya cara pandang negara yang menempatkan moke hanya sebagai objek pengawasan hukum. Dalam perspektif politik, tindakan demonstrasi juga memperlihatkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi merupakan aktor yang mampu menyampaikan kepentingan dan memengaruhi kebijakan negara. Keterlibatan PMKRI, petani moke, tokoh adat, dan masyarakat menunjukkan adanya mobilisasi politik untuk mempertahankan kepentingan bersama. Identitas budaya moke kemudian menjadi dasar legitimasi masyarakat dalam menyampaikan tuntutan. Slogan seperti "moke bukan narkoba" dan "moke adalah roh masyarakat Sikka" menunjukkan adanya usaha masyarakat membangun narasi tandingan terhadap pandangan negara mengenai moke.

Narasi tersebut sekaligus memperkuat solidaritas dan menunjukkan bahwa moke memiliki makna yang lebih luas bagi masyarakat Sikka. Resistensi terbuka tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak keberadaan hukum dan negara. Masyarakat justru menginginkan adanya aturan yang lebih jelas dan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Hal tersebut terlihat dari tuntutan PMKRI, tokoh adat, dan DPRD yang mendorong pembentukan regulasi daerah, legalisasi produksi moke, perlindungan terhadap petani moke, serta pengaturan distribusi moke secara resmi. Dengan demikian, resistensi yang dilakukan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi politik terhadap negara, bukan semata-mata sebagai tindakan penolakan terhadap hukum. Peneliti melihat bahwa resistensi muncul karena negara cenderung menggunakan pendekatan legal-formal dalam melakukan penertiban, sementara masyarakat mengharapkan pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif. Tindakan penyitaan secara langsung di tempat produksi dipandang belum memberikan ruang komunikasi yang cukup dengan masyarakat adat, petani moke, maupun pemerintah lokal. Akibatnya, muncul persepsi bahwa kebijakan tersebut kurang memperhatikan nilai budaya dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sikka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal dapat memunculkan ketegangan dan resistensi di tingkat masyarakat. Dengan demikian, resistensi terbuka masyarakat terhadap penyitaan moke di Kabupaten Sikka merupakan bentuk perlawanan politik yang dilakukan melalui ruang publik untuk menyampaikan ketidaksetujuan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal. Resistensi tersebut diwujudkan melalui demonstrasi, advokasi, protes, solidaritas masyarakat, dan tuntutan pembentukan regulasi. Dalam perspektif James C. Scott, tindakan tersebut merupakan *Public Transcript* karena dilakukan secara terbuka terhadap pihak yang memiliki kekuasaan. Pada akhirnya, resistensi masyarakat tidak hanya bertujuan menolak penyitaan, tetapi juga menjadi upaya mempertahankan identitas budaya, ruang sosial, dan sumber penghidupan masyarakat Sikka,

sekaligus mendorong negara agar menghasilkan kebijakan mengenai moke yang lebih jelas, legal, dan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat lokal.

***Hidden Transcript* (Perlawanan Tertutup) Masyarakat Terhadap Penyitaan Moke**

Selain melakukan resistensi secara terbuka melalui demonstrasi dan advokasi, masyarakat Kabupaten Sikka juga menunjukkan resistensi tertutup (*hidden transcript*) terhadap tindakan penyitaan moke oleh aparat kepolisian. Resistensi tertutup merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan secara tidak langsung dan tidak selalu terlihat di ruang publik. Dalam penelitian ini, bentuk resistensi tersebut terlihat melalui ketidakpatuhan secara diam-diam, kritik informal di lingkungan masyarakat, serta tetap berlangsungnya aktivitas produksi dan penjualan moke setelah adanya tindakan penyitaan oleh aparat kepolisian. Resistensi ini muncul karena masyarakat merasa bahwa penyitaan moke tidak hanya berdampak terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sikka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosep Yo'on Man selaku produsen moke, tindakan penyitaan menimbulkan kekecewaan karena moke merupakan bagian dari sumber pekerjaan masyarakat. Meskipun pernah mengalami penyitaan, ia menyatakan bahwa dirinya tetap melanjutkan aktivitas berjualan moke. Ia juga memandang bahwa moke telah menjadi tradisi masyarakat sehingga tidak seharusnya dihilangkan atau disita. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sikap tidak sepenuhnya menerima tindakan aparat. Keputusan untuk tetap berjualan menjadi salah satu bentuk tindakan masyarakat dalam mempertahankan sumber penghidupan sekaligus mempertahankan praktik yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut diperkuat oleh Viktor Nekur, S.H. selaku tokoh adat yang menjelaskan bahwa moke merupakan salah satu perlengkapan adat yang tidak dapat dihilangkan dari berbagai kegiatan adat. Ia juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat penjual moke mengenai pandangannya bahwa keberadaan moke perlu dipahami dalam konteks budaya masyarakat. Sementara itu, Johan Debrito dari PMKRI Maumere memandang bahwa ketika aktivitas produksi moke yang menjadi mata pencaharian masyarakat diganggu atau disita, kondisi tersebut berpengaruh terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pernyataan para informan tersebut memperlihatkan bahwa resistensi terhadap penyitaan moke tidak hanya berkaitan dengan keberadaan minuman tersebut, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menerima tindakan penyitaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Masyarakat tetap mempertahankan produksi dan penjualan moke sebagai bentuk perlindungan terhadap mata pencaharian dan budaya

lokal. Di samping itu, berkembang pula kritik informal di lingkungan masyarakat mengenai tindakan aparat yang dinilai kurang memahami kedudukan moke dalam kehidupan masyarakat Sikka. Kritik tersebut tidak selalu disampaikan melalui demonstrasi atau ruang publik, tetapi muncul dalam percakapan dan interaksi sehari-hari masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi bagian dari *Hidden Transcript* karena berlangsung di luar ruang resmi dan tidak selalu ditampilkan secara langsung kepada pihak yang berkuasa. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa setelah terjadinya penyitaan, aktivitas produksi moke masih berlangsung di beberapa wilayah Kabupaten Sikka. Masyarakat masih melakukan penyulingan secara tradisional di rumah-rumah produksi meskipun terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan dilakukannya razia kembali oleh aparat kepolisian. Selain aktivitas produksi, peneliti menemukan adanya kritik dan ketidaksetujuan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Masyarakat menilai bahwa tindakan penyitaan memberikan kerugian bagi masyarakat kecil, terutama bagi petani dan produsen yang menggantungkan sebagian penghasilannya pada produksi moke. Hasil dokumentasi dan pemberitaan lokal juga memperlihatkan adanya keresahan di kalangan masyarakat akibat tindakan penyitaan. Petani dan produsen moke menilai bahwa tindakan aparat terlalu menyasar aktivitas produksi masyarakat. Tokoh adat dan organisasi masyarakat juga menilai bahwa pendekatan yang terlalu represif dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal. Dalam konteks tersebut, keberadaan moke dipahami tidak hanya dari aspek hukum sebagai minuman beralkohol, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sikka. Dari sisi normatif, masyarakat juga menggunakan argumentasi mengenai hak atas pekerjaan dan perlindungan terhadap identitas budaya. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi masyarakat dan PMKRI dalam melihat dampak penyitaan terhadap sumber penghidupan produsen moke. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dalam konteks penelitian ini, kedua ketentuan tersebut menjadi bagian dari wacana masyarakat dalam mempertahankan kepentingan ekonomi dan budaya mereka.

Resistensi Tertutup dalam Perspektif James C. Scott

Berdasarkan teori resistensi James C. Scott, bentuk tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai *hidden transcript*. Scott (1990) menjelaskan bahwa *Hidden Transcript* merupakan bentuk resistensi yang muncul di balik ruang publik dan biasanya dilakukan oleh kelompok yang berada pada posisi subordinat ketika berhadapan dengan kekuasaan yang dominan.

Resistensi ini tidak dilakukan secara frontal, tetapi melalui tindakan sehari-hari, ketidakpatuhan tersembunyi, kritik informal, dan praktik sosial yang tetap dijalankan sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan. Dalam penelitian ini, negara melalui aparat kepolisian memiliki legitimasi hukum dan kekuasaan formal untuk melakukan penertiban terhadap minuman beralkohol, termasuk moke. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Sikka memandang moke sebagai bagian dari budaya, identitas masyarakat adat, dan sumber penghidupan. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya menerima tindakan penyitaan. Ketidaksetujuan tersebut kemudian diwujudkan melalui tindakan yang lebih tersembunyi, seperti tetap memproduksi dan menjual moke, mempertahankan penggunaan moke dalam kegiatan adat, serta menyampaikan kritik secara informal terhadap tindakan aparat. Resistensi tertutup tersebut menunjukkan bahwa dominasi negara tidak selalu diterima secara penuh oleh masyarakat.

Meskipun negara memiliki kewenangan formal untuk melakukan penertiban, masyarakat memiliki kemampuan sosial dan budaya untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Dalam perspektif Scott, tindakan sehari-hari tersebut menjadi cara kelompok yang berada pada posisi lebih lemah untuk mempertahankan kepentingannya tanpa harus melakukan konfrontasi langsung dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Masyarakat berada pada posisi yang relatif lemah dibandingkan negara karena aparat memiliki instrumen hukum, kewenangan keamanan, dan kekuatan koersif. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih strategi yang lebih tersembunyi. Tetap berlangsungnya produksi dan distribusi moke setelah penyitaan dapat dipahami sebagai bentuk strategi bertahan masyarakat untuk menjaga sumber penghasilan mereka. Demikian pula dengan tetap dipertahankannya penggunaan moke dalam kegiatan adat, yang menunjukkan bahwa masyarakat berusaha menjaga keberlanjutan praktik budaya meskipun menghadapi tekanan dari kebijakan negara. Selain melalui praktik produksi dan penjualan, *Hidden Transcript* juga terlihat dari berkembangnya kritik informal. Masyarakat membangun pandangan bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan yang merugikan masyarakat kecil dan kurang mempertimbangkan budaya lokal. Kritik tersebut berkembang dalam percakapan sehari-hari dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan tanpa harus menyampaikannya secara langsung kepada aparat. Dengan demikian, ruang sosial masyarakat menjadi tempat berkembangnya narasi alternatif terhadap kebijakan negara. Resistensi tertutup tersebut juga dapat dipahami sebagai respons terhadap pengalaman ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa tindakan penyitaan dilakukan dengan pendekatan yang terlalu represif dan belum mempertimbangkan kondisi ekonomi serta nilai budaya masyarakat lokal. Ketika masyarakat merasa bahwa

kebijakan negara tidak sesuai dengan kepentingan mereka, muncul berbagai bentuk tindakan untuk mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam hal ini, resistensi tidak selalu berbentuk aksi besar, tetapi dapat berlangsung melalui praktik kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian tersebut juga sejalan dengan pandangan Gramsci bahwa kelompok subordinat tidak selalu menerima dominasi secara pasif. Masyarakat dapat membangun berbagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan nilai, kepentingan, dan identitas mereka. Perlawanan dapat dilakukan melalui praktik sosial sehari-hari yang mencerminkan ketidaksetujuan terhadap dominasi. Dalam kasus masyarakat Sikka, keberlanjutan produksi dan penjualan moke serta penggunaan moke dalam kegiatan adat menunjukkan adanya usaha untuk mempertahankan budaya dan sumber penghidupan di tengah tekanan kebijakan negara.

Resistensi sebagai Bentuk Negosiasi Politik

Peneliti melihat bahwa resistensi tertutup masyarakat Kabupaten Sikka memperlihatkan adanya ketegangan dalam relasi antara negara dan masyarakat lokal. Negara hadir dengan pendekatan legal-formal yang menempatkan moke sebagai objek hukum yang perlu dikontrol dan ditertibkan. Sebaliknya, masyarakat memahami moke sebagai bagian dari ruang sosial, budaya, dan ekonomi yang telah hidup secara turun-temurun. Perbedaan tersebut menjadi dasar munculnya resistensi. Resistensi tertutup juga memperlihatkan bahwa kekuasaan negara tidak sepenuhnya bersifat absolut. Negara memang memiliki kewenangan formal untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tetap menjadi faktor penting. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan tidak mencerminkan keadilan sosial dan tidak menghargai budaya lokal, mereka dapat merespons melalui berbagai strategi, termasuk resistensi yang tersembunyi. Dalam konteks penelitian ini, tindakan masyarakat yang tetap memproduksi dan menjual moke setelah penyitaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap posisi mereka dalam hubungan kekuasaan dengan negara. Masyarakat menyadari adanya tekanan dari aparat, tetapi pada saat yang sama tetap berusaha mempertahankan praktik yang dianggap penting bagi kehidupan mereka. Resistensi tertutup juga menunjukkan adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pendekatan negara dalam mengelola persoalan budaya lokal. Masyarakat merasa bahwa negara lebih menekankan aspek pengawasan dan penertiban daripada perlindungan terhadap budaya dan ekonomi lokal. Situasi tersebut mendorong masyarakat memperkuat solidaritas internal dan mempertahankan praktik budaya melalui ruang sosial mereka sendiri. Dalam perspektif politik lokal, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya dapat menjadi arena pertarungan kepentingan antara negara dan

masyarakat. Negara berusaha mendefinisikan moke sebagai objek pengawasan hukum, sedangkan masyarakat membangun pemaknaan bahwa moke merupakan identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Perbedaan definisi tersebut menghasilkan resistensi yang berlangsung baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Dengan demikian, resistensi tertutup masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penyitaan moke merupakan bentuk perlawanan sehari-hari yang dilakukan untuk mempertahankan budaya, sumber penghidupan, dan ruang sosial masyarakat lokal. Berdasarkan teori James C. Scott, tetap berlangsungnya produksi dan penjualan moke, penggunaan moke dalam kegiatan adat, kritik informal, serta solidaritas internal masyarakat menunjukkan karakter *hidden transcript*. Resistensi tersebut muncul karena masyarakat berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan negara sehingga memilih strategi perlawanan yang tidak selalu dilakukan secara frontal. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan penyitaan moke tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan penegakan hukum. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan relasi kekuasaan, identitas budaya, hak atas penghidupan, dan keberadaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan moke membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga dialogis dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat adat, produsen moke, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pihak terkait dalam merumuskan regulasi mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi moke. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mempertimbangkan konteks budaya lokal, diharapkan kepentingan penegakan hukum dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap budaya dan sumber penghidupan masyarakat Sikka.

Faktor-Faktor Resistensi Masyarakat Terhadap Penyitaan Moke

Berdasarkan hasil penelitian, resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka muncul sebagai respons terhadap tindakan aparat kepolisian yang dipandang masyarakat tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, sosial, serta kepentingan masyarakat lokal. Bagi masyarakat Sikka, moke tidak hanya dipahami sebagai minuman beralkohol, tetapi memiliki kedudukan sebagai bagian dari identitas budaya, perlengkapan dalam ritual adat, sumber mata pencaharian, dan bagian dari hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyitaan moke dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh kehidupan budaya dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama yang melatarbelakangi resistensi, yaitu faktor budaya, ekonomi, sosial, serta kebijakan dan penegakan hukum. Pertama, resistensi budaya muncul karena moke telah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan adat masyarakat Sikka. Berdasarkan keterangan tokoh adat, moke telah

digunakan secara turun-temurun dan memiliki makna sebagai "air kehidupan" serta digunakan dalam berbagai ritual adat, termasuk pemberian makan kepada arwah atau leluhur. Moke juga hadir dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, penyelesaian konflik, perkawinan, hingga kematian. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan moke tidak dapat dipisahkan dari praktik budaya masyarakat Sikka.

Karena itu, penyitaan moke dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan budaya dan identitas lokal. Resistensi budaya terlihat melalui upaya masyarakat mempertahankan penggunaan moke dalam ritual adat, memperkuat narasi bahwa moke merupakan warisan budaya, serta menolak pandangan yang hanya menempatkan moke sebagai minuman beralkohol. Dalam perspektif James C. Scott, kondisi tersebut menunjukkan resistensi kelompok masyarakat ketika kekuasaan dominan memasuki dan mengontrol ruang sosial serta budaya mereka. Masyarakat kemudian menggunakan identitas budaya sebagai dasar untuk mempertahankan kepentingannya. Pandangan tersebut diperkuat oleh Hall mengenai identitas budaya sebagai hasil sejarah dan pengalaman kolektif serta Geertz mengenai pentingnya simbol budaya dalam mempertahankan nilai dan identitas masyarakat. Kedua, resistensi ekonomi berkaitan dengan posisi moke sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Hasil wawancara dengan produsen moke menunjukkan bahwa produksi moke telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penyitaan moke menyebabkan aktivitas produksi dan penjualan terganggu sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Petani, produsen, dan penjual moke memandang tindakan penyitaan sebagai ancaman terhadap sumber penghidupan mereka. Pandangan tersebut juga didukung oleh PMKRI dan DPRD yang melihat bahwa aktivitas moke memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah sendiri menyatakan adanya keinginan agar penyebaran moke dapat dilakukan secara legal dan teratur. Dengan demikian, resistensi ekonomi bukan semata-mata penolakan terhadap pengawasan, tetapi merupakan respons masyarakat terhadap hilangnya atau terganggunya sumber penghasilan. Dalam teori Scott, resistensi dapat muncul ketika tindakan pihak yang berkuasa mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan kelompok masyarakat. Perbedaan cara pandang antara negara yang melihat moke sebagai objek pengawasan minuman beralkohol dan masyarakat yang melihatnya sebagai bagian dari ekonomi rakyat kemudian menciptakan ketegangan antara negara dan masyarakat. Ketiga, resistensi sosial muncul karena adanya solidaritas dan kepentingan bersama dalam mempertahankan keberadaan moke. Penolakan terhadap penyitaan tidak dilakukan secara individual, tetapi melibatkan berbagai kelompok, seperti petani moke, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi PMKRI, dan masyarakat umum. Bentuk resistensi

tersebut terlihat melalui demonstrasi, konsolidasi, advokasi, dan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak penyitaan.

Keterlibatan berbagai kelompok menunjukkan bahwa persoalan moke telah berkembang menjadi persoalan kolektif. Solidaritas tersebut terbentuk karena adanya kesamaan nilai, pengalaman, identitas budaya, dan kepentingan ekonomi. Dalam perspektif Scott, pengalaman menghadapi tekanan yang sama dapat membangun kesadaran bersama dan mendorong masyarakat melakukan tindakan kolektif. Temuan ini juga sejalan dengan Durkheim mengenai solidaritas sosial yang terbentuk melalui kesamaan nilai dan norma, serta teori mobilisasi sumber daya McCarthy dan Zald yang menekankan pentingnya jaringan organisasi dan dukungan sosial dalam membangun gerakan kolektif. Dengan demikian, kekuatan sosial masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat resistensi terhadap penyitaan moke. Keempat, resistensi terhadap kebijakan dan penegakan hukum muncul karena masyarakat menilai bahwa tindakan penyitaan belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi budaya dan ekonomi masyarakat Sikka. Masyarakat tidak sepenuhnya menolak adanya pengaturan terhadap moke, tetapi menginginkan adanya aturan yang jelas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi moke. Tokoh adat menginginkan adanya peraturan daerah yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan moke, sementara DPRD mendorong pengembangan moke sebagai industri lokal. Pemerintah daerah juga menyatakan keinginan agar distribusi moke dapat dilakukan secara legal dan teratur. Di sisi lain, pihak kepolisian menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan terutama ketika moke ditemukan dalam jumlah banyak karena dinilai berpotensi disalahgunakan dan dapat menimbulkan gangguan sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan perspektif antara negara dan masyarakat. Negara menekankan aspek ketertiban dan pengawasan, sedangkan masyarakat menekankan aspek budaya dan ekonomi. Dalam perspektif Scott, perbedaan tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa antara negara dan masyarakat, di mana resistensi muncul ketika kebijakan yang diterapkan dianggap mengancam kepentingan masyarakat. Keempat faktor tersebut kemudian tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan. Moke memiliki kedudukan yang sekaligus bersifat budaya, ekonomi, dan sosial, sehingga ketika terjadi penyitaan, dampaknya dirasakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Persoalan tersebut semakin kuat karena belum adanya regulasi khusus yang secara jelas mengatur pengelolaan moke di Kabupaten Sikka. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk melakukan resistensi melalui demonstrasi, advokasi, konsolidasi, tuntutan pembentukan regulasi, serta dialog dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Selanjutnya, resistensi masyarakat tidak berhenti pada tindakan penolakan, tetapi berkembang menjadi negosiasi antara masyarakat dan

negara. Setelah terjadi penyitaan, PMKRI bersama tokoh masyarakat melakukan dialog dengan Kapolres Sikka. DPRD mendorong adanya regulasi dan pengembangan moke sebagai industri lokal, sedangkan pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap legalisasi dan pengaturan distribusi moke.

Tokoh adat juga mendorong adanya perlindungan hukum terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi moke. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghendaki penghapusan seluruh bentuk pengaturan, tetapi menginginkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan budaya dan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban sosial. Dalam perspektif James C. Scott, perkembangan dari resistensi menuju negosiasi menunjukkan bahwa masyarakat lokal bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek politik yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara. Masyarakat menggunakan demonstrasi, solidaritas sosial, identitas budaya, advokasi, dan dialog sebagai sumber kekuatan untuk menyampaikan kepentingannya. Temuan tersebut juga sejalan dengan Migdal yang melihat hubungan negara dan masyarakat sebagai hubungan yang saling memengaruhi serta Ansell dan Gash yang menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan publik. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penyitaan moke merupakan bentuk perjuangan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya, sumber penghidupan, kepentingan sosial, dan memperoleh kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Resistensi tersebut bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap hukum, tetapi juga merupakan kritik terhadap cara penegakan hukum yang dianggap belum sensitif terhadap realitas masyarakat. Pada akhirnya, munculnya negosiasi antara masyarakat dan negara memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan moke membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berbasis pada kondisi sosial budaya masyarakat Sikka. Pemerintah daerah perlu menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi moke dengan tetap memperhatikan ketertiban sosial, sekaligus memberikan perlindungan terhadap budaya dan sumber ekonomi masyarakat lokal.

Sintesis Temuan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyitaan moke oleh aparat kepolisian di Kabupaten Sikka tidak hanya dipahami sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi juga dipersepsikan sebagai bentuk intervensi terhadap budaya, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat Sikka, moke merupakan warisan budaya yang memiliki nilai adat sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap penyitaan moke muncul dalam dua bentuk utama, yaitu

resistensi terbuka (*public transcript*) dan resistensi tertutup (*hidden transcript*). Resistensi terbuka terlihat melalui aksi demonstrasi, advokasi, dan penyampaian tuntutan kepada pemerintah dan aparat kepolisian. Sementara itu, resistensi tertutup terlihat dari tindakan masyarakat yang tetap memproduksi dan menjual moke serta munculnya kritik-kritik informal terhadap kebijakan penyitaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa resistensi masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, ekonomi, sosial, serta kebijakan dan penegakan hukum. Masyarakat memandang moke sebagai identitas budaya, sumber mata pencaharian, bagian dari kehidupan sosial, serta menilai bahwa kebijakan penyitaan belum sepenuhnya memperhatikan kondisi masyarakat lokal. Dalam perspektif teori resistensi James C. Scott, temuan ini menunjukkan bahwa resistensi muncul ketika masyarakat merasa kepentingan, identitas, dan ruang hidup mereka terancam oleh kebijakan yang diterapkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, resistensi masyarakat terhadap penyitaan moke dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan budaya, solidaritas sosial, dan sumber penghidupan mereka di tengah kebijakan negara yang bersifat legal-formal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai resistensi masyarakat terhadap penyitaan minuman tradisional moke di Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa penyitaan moke oleh aparat kepolisian tidak hanya dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi juga dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk intervensi terhadap budaya, kehidupan sosial, dan sumber penghidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sikka, moke merupakan warisan budaya yang digunakan dalam berbagai ritual adat sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Resistensi masyarakat ditemukan dalam dua bentuk berdasarkan teori James C. Scott, yaitu *Public Transcript* dan *hidden transcript*. *Public Transcript* terlihat melalui demonstrasi, advokasi PMKRI, penyampaian tuntutan, serta dialog dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Sementara itu, *Hidden Transcript* terlihat melalui kritik informal dan tetap berlangsungnya aktivitas produksi serta penjualan moke oleh masyarakat. Munculnya resistensi tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor budaya, ekonomi, sosial, serta kebijakan dan penegakan hukum. Faktor budaya berkaitan dengan moke sebagai identitas dan warisan budaya masyarakat Sikka. Faktor ekonomi berkaitan dengan moke sebagai sumber penghidupan. Faktor sosial terlihat dari solidaritas antara petani moke, tokoh adat, organisasi mahasiswa, dan masyarakat. Sedangkan faktor kebijakan dan penegakan hukum muncul karena masyarakat menilai bahwa penyitaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian juga menunjukkan adanya negosiasi antara

masyarakat dan negara. Masyarakat, tokoh adat, PMKRI, DPRD, dan pemerintah daerah berupaya membangun dialog untuk menciptakan pengelolaan moke yang lebih teratur dan memiliki kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai budaya dan manfaat ekonominya.

Dengan demikian, resistensi masyarakat tidak hanya berupa penolakan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan identitas, kepentingan ekonomi, dan ruang sosial sekaligus mendorong perubahan kebijakan. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang secara khusus mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi moke dengan tetap memperhatikan nilai budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat. Penyusunan regulasi perlu melibatkan tokoh adat, masyarakat, produsen moke, DPRD, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan, legalisasi usaha, dan pembinaan agar pengelolaan moke dapat berlangsung secara tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi Masyarakat Kabupaten Sikka, Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan melestarikan moke sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Pada saat yang sama, masyarakat perlu mendukung pengelolaan moke yang tertib dan bertanggung jawab serta berpartisipasi dalam dialog dan proses penyusunan kebijakan agar kepentingan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat dapat terakomodasi. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai resistensi masyarakat, hubungan negara dan masyarakat, politik budaya, serta kebijakan berbasis kearifan lokal dengan menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda. Penelitian juga dapat mengkaji dampak ekonomi moke, perlindungan budaya lokal, efektivitas regulasi, serta pengembangan moke sebagai produk ekonomi masyarakat. Intinya, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan moke di Kabupaten Sikka bukan sekadar persoalan penertiban minuman beralkohol, tetapi berkaitan dengan budaya, ekonomi, solidaritas sosial, kebijakan, serta relasi antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang dialogis, partisipatif, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

DAFTAR REFERENSI

Agung, S., dkk. (2025). Perlindungan konsumen terhadap peredaran minuman keras ilegal berkaitan adanya legalisasi terhadap minuman alkohol khas Bali.

Al-Jabiri, M. A. (2000). *Kebiasaan leluhur yang diturunkan turun-temurun*.

Ama Nair, Hasan, & Rahmawati. (2025). Industri tradisional moke sebagai sumber ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Sikka. *Jurnal Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat, 6*(1), 45–58.

Andika, A., dkk. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol (Studi kasus di Desa Sibaluton Kabupaten Tolitoli). *Jurnal Sektor Publik, 2*(2).

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bao, A. P., Limbu, P. B. B., & Azi, P. Y. (2024). Kajian minuman tradisional moke sebagai objek gastronomi pada masyarakat Bajawa Kabupaten Ngada. *Jurnal Pertanian Unggul, 3*(1), 73–79.

Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.

Detha, A. I., & Datta, A. A. (2016). Skrining fitokimia minuman tradisional moke dan sopi sebagai kandidat antimikroba. *Jurnal Kajian Veteriner, 4*(1), 110.

Durkheim, E. (2014). *The division of labor in society*. Free Press.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1948). *Social anthropology: An interpretive introduction to the study of society*. The Macmillan Company.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), *Identity: Community, culture, difference*. Lawrence & Wishart.

Ida, Y., dkk. (2024). Moke sebagai simbol identitas budaya masyarakat Sikka di tengah perubahan sosial modern. *Jurnal Antropologi Indonesia, 45*(2), 120–134.

Intima. (2007). *Pengertian tradisional sebagai cara pertama yang lahir dan digunakan banyak orang*.

Ishkanian, A. (2022). Social movements and social policy: New research horizons. *Journal of Social Policy, 51*(4), 1–10. https://doi.org/10.1017/S0047279421001008

Jurnal

Koentjaraningrat. (1985). *Javanese culture*. Oxford University Press.

Kruger, V. (2014). *Empat pilar kuliner Indonesia: Rempah-rempah, gula merah, dan tradisi minuman lokal*.

Lobo. (2020). *Regulasi minuman tradisional dan ketegangan sosial di Nusa Tenggara Timur*.

Makin, dkk. (2024). Peran moke dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai keluarga di kalangan masyarakat adat Lisedetu di Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende.

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: Partial theory. *American Journal of Sociology, 82*(6), 1212–1241. https://doi.org/10.1086/226464

Migdal, J. S. (2001). *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511613067

Namasamon, J., & Sukapti, R. (2024). Tradisi minuman moke (Studi kasus pada masyarakat Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Bontang Barat). *Jurnal Sosio-Ekonomika Kelautan dan Perikanan, 5*(2), 112–125.

Nugroho, A., & Prasetyo, B. (2022). Peran identitas budaya dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat lokal. *Jurnal Masyarakat dan Budaya, 24*(2), 145–158.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.

Scott, J. C. (2000). *[Judul tidak teridentifikasi]*.

Soemardjan, S. (1993). *Perubahan sosial di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Taris. (2013). *Moke sebagai minuman tradisional khas Sikka NTT: Variasi nama regional dan warisan lontar*.

Taris. (2019). *Moke/Tuak sebagai industri minuman tradisional NTT: Produksi organik dari lontar*.